KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

## BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 FINAL/TIDAK FINAL

1721-B1

W.								
KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK			H.1 NOMOR : 1 0 0 0 0 1 4 6 3  H.2 X Pembetulan Ke- 0 H.3 Pembatalan				H.4 X Final H.5 Tidak Final	
A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG								
A.1 NPWP : 68 807 599 3 722 000								
A.2 NIK :								
A.3 Nama : BUDI RAHMAN								
B. PPh PASAL 21 YANG DIPOTONG								
MASA PAJAK (mm-yyyy) KODE OBJEK PAJAK		JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)		DASAR PENGENAAN PAJAK (Rp)	TARIF LEBIH TINGGI 20% (TIDAK BER- NPWP)	TARIF (%)	PPh DIPOTONG/DTP (Rp)	
B.1	B.2		B.3	B.4	B.5	B.6	B.7	
4	21-402-01		920.000	920.000	0	5	46.000	
B.8 Dokumen Referensi : Nomor Dokumen  Nama Dokumen  Bukti Pembayaran  Tanggal  2 0 dd  0 4 mm  2 0 2 2 yyyy  B.9 PPh Pasal 21 dibebaskan dari pemotongan berdasarkan Surat Keterangan Bebas (SKB). Pembebasan ini berdasarkan SKB.  Nomor:  Tanggal  dd  mm  yyyyy  B.10 PPh Pasal 21 ditanggung oleh Pemerintah (DTP) berdasarkan :  B.11 PPh yang dipotong/dipungut yang diberikan fasilitas PPh berdasarkan :								
	: ndatangan :	2 1 HARI C Dengan tandata	dd 0 4 mm IUMADI ini saya menyatakan bangani secara elektronik.	RAH ATMA HUSADA MAHAK  2 0 2 2 yyyy  ahwa bukti Pemotongan/Pemungut	tan Unifikasi telah s	aya isi dengan	benar dan telah saya	
	列生强烈							

VOWKPYGG